

---

## PERANAN PENGGUNAAN FISKAL DESA TERHADAP KEMISKINAN PEDESAAN DI KABUPATEN JOMBANG

**Chyntia Ersya Varina<sup>1</sup>**

Email: [chyntia.varina@gmail.com](mailto:chyntia.varina@gmail.com)

**Teguh Hadi Priyono<sup>2</sup>**

Email: [teguh\\_hadipriyo@yahoo.com](mailto:teguh_hadipriyo@yahoo.com)

**Fajar Wahyu Prianto<sup>3</sup>**

Email: [fajar.prianto@unej.ac.id](mailto:fajar.prianto@unej.ac.id)

**Sunlip Wibisono<sup>4</sup>**

Email: [sunlipwibisono1958@gmail.com](mailto:sunlipwibisono1958@gmail.com)

### **Abstract**

*Poverty is one of the main problems in both developed and developing countries. Various factors that can cause poverty include low investment levels, slow economic growth, uneven infrastructure development, ineffective government spending on poverty alleviation programs. The government has not been effective in allocating the APBN or APBD in the poverty program so that poverty still cannot be overcome. As we know that poverty is one of the conditions discussed by the community, one of which is in Jombang Regency. The purpose of this study was to determine the role of village fiscal on poverty that occurred in Jombang Regency.*

*This type of research is explanatory research with secondary data type in the form of panel data consisting of time series data for 2010-2019 and cross-section data of 8 villages in Jombang Regency. Analysis of the data in this study using Multiple Regression. The test results of this study indicate that the APBDes Infrastructure budget has a negative and significant effect on poverty in Jombang Regency. Poverty subsidy APBDes has a negative and significant effect on poverty in Jombang Regency. While the BUMDES economic APBDes has a positive effect on poverty. The influence of the independent variable on the dependent variable has an effect of 99.99% as well as a measure of the success rate of regression in predicting the value of the independent variable on the dependent.*

**Keywords:** *Poverty, APBDes, Panel Data Regression*

---

<sup>1</sup> Corresponding author: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Jl. Kalimantan No. 37, Jember, 68121

<sup>2,3,4</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Jl. Kalimantan No. 37, Jember, 68121

## 1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu isu sentral bagi negara maju maupun negara berkembang. Salah satu negara yang masih berkuat pada kemiskinan adalah Indonesia. pemerintah selalu menerapkan berbagai kebijakan yang dapat diaplikasikan untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Hal ini membuahkan hasil bagi pemerintah karena beberapa tahun kemiskinan dapat berkurang. Salah satu daerah yang dapat mengatasi kemiskinan adalah Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang selalu menerapkan koordinasi dengan pemerintah desa serta melakukan pengawasan dan memberikan bantuan kepada pemerintah desa untuk dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada.

Kemiskinan dapat dilihat dari garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen, yaitu: (1) pengeluaran yang diperlukan untuk memberi standar gizi minimum dan kebutuhan dasar; (2) Jumlah kebutuhan masyarakat yang sangat bervariasi yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan sehari-hari (Kuncoro 1997). Badan Pusat Statistik (2010) menetapkan penetapan perhitungan dari garis kemiskinan yang ada di masyarakat adalah masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan nilai tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan minimum makanan yang digunakan patokan yaitu 2.100 kilokalori per kapita per hari.

Kabupaten Jombang merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki angka kemiskinan berada di bawah angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Jombang setiap tahun mengalami penurunan angka kemiskinan, tetapi masih banyak desa yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Pemerintah desa masih banyak yang belum bisa mendistribusikan APBDes dengan maksimal untuk pengurangan kemiskinan. Hal ini menjadi sebuah pr bagi pemerintah kabupaten untuk dapat membantu pemerintah desa mendistribusikan APBDes dengan optimal.

Peranan pendistribusian sangat diharapkan oleh masyarakat dapat mensejahterakan dan membangun perekonomian lebih baik. Hal tersebut tak lepas dari peran pemerintah desa. Salah satu contoh dari peranan pemerintah desa di Kabupaten Jombang memberikan fasilitas guna untuk mensejahterakan masyarakat dan juga pengentasan kemiskinan. Dapat dilihat dari angka kemiskinan setiap tahun mengalami penurunan dan juga banyaknya fasilitas umum yang didapatkan di desa. Tetapi meskipun angka dari kemiskinan selalu menurun tetapi masih ada beberapa desa yang memiliki jumlah tingkat kemiskinan yang tinggi.

Kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang didominasi oleh penduduk pedesaan yang masih mengandalkan pada sektor pertanian, tingkat pendidikan rendah, dan terbatasnya informasi, serta permodalan sehingga penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jombang sedikit terlambat dalam pengentasan kemiskinan. Kebijakan yang diterapkan di Kabupaten Jombang dalam pengentasan kemiskinan berfokus pada pemerataan pembangunan pada desa. Selain itu pemerintah Kabupaten Jombang juga memberikan bantuan secara tunai kepada masyarakat miskin untuk dapat membantu meringankan beban serta dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Salah satu desa yang ada di Kabupaten Jombang yang memiliki angka kemiskinan tertinggi dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan adalah Desa Sumber Mulyo, Desa Sidokerto, Desa Pulo Sari, Desa Losari, Desa Karang Pakis, Desa Mojodanu, Desa Carangwulung, dan Desa Klitih. Desa tersebut dapat mengurangi

angka kemiskinan dengan alokasi APBDes yang sesuai dengan keadaan desa tersebut. Pendistribusian APBDes dari 8 desa tersebut termasuk salah satu yang dapat mengurangi angka kemiskinan serta optimal dalam pendistribusiannya.

Pemerintah Kabupaten Jombang berharap bahwa pemerintah desa dapat membantu untuk mengurangi angka kemiskinan melalui pemerataan pembangunan serta pemberian bantuan tunai kepada masyarakat miskin. Peran pemerintah desa dalam menentukan sasaran masyarakat miskin sangatlah dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Jombang agar tepat sasaran. Selain itu pemerintah kabupaten juga berharap bahwa APBDes dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk dapat berperan aktif dalam mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh APBDes anggaran infrastruktur publik terhadap kemiskinan?
2. Bagaimana pengaruh APBDes subsidi program kemiskinan terhadap kemiskinan?
3. Bagaimana pengaruh APBDes penyertaan model ekonomi BUMDES terhadap kemiskinan?

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran APBDes anggaran infrastruktur publik terhadap kemiskinan.
2. Untuk mengetahui peran APBDes program subsidi kemiskinan terhadap kemiskinan.

Untuk mengetahui peran APBDes penyertaan model ekonomi BUMDES terhadap kemiskinan.

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 Teori Kemiskinan

Supriatna (1997, dalam Kadji 2012) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. World Bank (2000) mendefinisikan bahwa kemiskinan merupakan kehilangan kesejahteraan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup, menurut Badan Pusat Statistika (BPS). BPS telah menetapkan garis kemiskinan, dimana garis kemiskinan adalah jumlah pengeluaran yang dibutuhkan setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan makanan dan kebutuhan nonmakanan setiap harinya.

Friedman (1979) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial, dimana basis sosial meliputi modal produktif meliputi asset, sumber keuangan meliputi *income* dan kredit, organisasi sosial dan politik yang digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, *network* untuk memperoleh pekerjaan dan sebagainya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Friedman menyebutkan bahwa masyarakat miskin biasanya tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar mereka. Teori dari Sukirno (2003) menjelaskan bahwa kegiatan investasi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga kemiskinan akan berkurang.

Emil Salim (dalam Rizal 2015) mengatakan bahwa ada lima karakteristik kemiskinan antara lain (1) penduduk miskin tidak mempunyai faktor produksi sendiri, (2) tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan aset dengan kekuatan sendiri, (3) tingkan pendidikan rendah, (4) tidak memiliki keterampilan, (5) tidak memiliki fasilitas. Teori kemiskinan yang menyangkut kewirausahaan dari Simon Kuznet

mengatakan bahwa ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi yang terus meningkat. Hal ini menandakan bahwa kebutuhan manusia bermacam-macam sehingga harus mencukupi kebutuhan manusia melalui kewirausahaan. Teori ini mengatakan bahwa kemiskinan dapat berkurang dengan mengurangi kemiskinan dengan adanya pemenuhan kebutuhan.

## 2.2 APBDes

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014), dikatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang disepakati oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. Sumpeno (2011) mengatakan bahwa APBDes merupakan rencana tahunan keuangan desa yang berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belana untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.

Pengelolaan APBDes didasarkan pada partisipasi, transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat dipastikan bahwa pemerintah desa mengelola anggaran dengan baik. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki output berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun setiap perencanaannya dan dituangkan dalam APBDes. Struktur yang ada di dalam APBDes antara lain yaitu pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pemerintah desa diharapkan dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan APBDes sesuai dengan kebutuhan desa dana dapat mengentaskan kemiskinan yang ada di desa. Sukasmanto et al. (2004) menjelaskan proses penganggaran dari APBDes dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, penyelenggaraan pemerintah yang efektif, pemerintah tanggap aspirasi masyarakat, serta profesionalitas.

## 2.3 Investasi

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran pendapatan dari pemerintah untuk melakukan penanaman modal untuk pembelian barang modal serta perlengkapan produksi guna menambah kemampuan untuk dapat memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno 2003). Investasi adalah penanaman modal yang dapat menyangkut penggunaan sumber - sumber seperti peralatan, mesin, peralatan produksi, serta gedung atau persediaan lainnya yang diharapkan mampu untuk memberikan keuntungan bagi para investor (Samuelson dan Nordhaus 1993).

Sedangkan menurut Lipsey et al. (1997) investasi merupakan pengeluaran atas barang yang tidak dikonsumsi saat ini dan didasarkan pada periode waktu. Menurut Lipsey et al. (1997) investasi dibagi menjadi tiga waktu periode antara lain investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. investasi merupakan sejumlah dana yang pada suatu periode digunakan untuk mendapatkan pendapatan yang dihadapkan pada masa yang akan datang.

Sukirno (2000) mengatakan bahwa kegiatan dari investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan menghasilkan peningkatan kegiatan ekonomi serta kesempatan kerja. Hal ini berarti bahwa dengan terbukanya kesempatan kerja akan menambah pendapatan nasional dan juga meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemakmuran dari masyarakat. Kondisi ini merupakan peran dari tiga fungsi dari investasi yaitu (1) investasi adalah komponen dari pengeluaran agregat, sehingga

adanya kenaikan dari investasi dapat meningkatkan pendapatan agregat, (2) peningkatan barang modal sebagai bentuk dari investasi yang akan menambah produksi, (3) investasi diikuti oleh perkembangan teknologi.

## 2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi menurut Boediono (2012) adalah penjelasan mengenai faktor yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai bagaimana faktor tersebut terjadi proses pertumbuhan. Dalam pemahaman makro, pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan PDB yang berarti peningkatan pendapatan (Tambunan 2012). Sedangkan menurut Siregar dan Wahyuniarti (2007) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian daerah atau negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam periode tertentu. Todaro (2000) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Dalam pengertian ini menekankan dalam tiga hal, yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang.

Menurut Adam Smith (dalam Arsyad 1992) bahwa pertumbuhan ekonomi dapat ditentukan melalui sumber daya alam, sumber daya manusia, dan barang modal. Dalam hal ini Adam Smith membagi pekerjaan secara spesialis dan pembagian jam kerja. Selain itu dikatakan bahwa produktifitas akan mengakibatkan meluasnya pasar dan adanya tingkat keuntungan maksimum. Malthus (1836) mengatakan bahwa pembangunan perekonomian merupakan kesejahteraan negara dimana PDB meningkat. Menurutnya ada 2 faktor pendorong pertumbuhan yaitu faktor ekonomi (sumber daya alam, sumber daya manusia, modal) dan non ekonomi (kekayaan, hukum yang pasti). Sedangkan Marx (2004) membagi perkembangan ekonomi menjadi 5 antara lain perekonomian komunal primitif, perbudakan, feodal, kapitalis, dan sosialis.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan peneliti merupakan jenis penelitian *explanatory*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif.

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Penggunaan jenis data pada penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu data sekunder berupa data panel. Fenomena yang diambil oleh peneliti yaitu tahun 2010-2019, dimana tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh APBDes anggaran infrastruktur publik, APBDes subsidi kemiskinan, APBDes penyertaan modal ekonomi BUMDES.

Fokus objek pada penelitian kali ini adalah 8 desa di Kabupaten Jombang. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari variabel pengamatan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, Desa Sumber Mulyo Jombang, Desa Sidokerto Jombang, Desa Pulo Sari Jombang, dan Desa Losari Jombang, Desa Karang Pakis Jombang, Desa Mojodanu Jombang, Desa Carangwulung Jombang, dan Desa Klitih Jombang.

### 3.3 Model Penelitian

Model yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui variabel-variabel yang digunakan sesuai dengan keinginan peneliti sebagai berikut:

$$KM_{it} = \beta_0 + \beta_1 AIP_{it} + \beta_2 APK_{it} + \beta_3 AME_{it} + e_{it}$$

### 3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program Eviews 12. Metode yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini yaitu:

- Pengujian model regresi terdiri dari REM, CEM, dan FEM melalui pengujian Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier.
- Pengujian asumsi Klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji Heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.
- Penguian hipotesis terdiri dari uji F dan uji T.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Pengujian model regresi

Pengujian model dalam penelitian ini menggunakan pengujian Uji *Chow* dan Uji *Hausman* dengan hasil uji sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Hasil Uji *Chow***

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3357.602599	(7,69)	0.0000
Cross-section Chi-square	466.697408	7	0.0000

Hasil dari Uji *Chow* dapat dilihat dari nilai probabilitas *chi square* lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan nilai kritis atau alpha sebesar 5% atau 0.05. Hasil pengujian model dengan menggunakan Uji *Chow* diperoleh nilai probabilitas *chi square* sebesar 0.0000. Nilai ini menunjukkan bahwa nilai *chi square* lebih kecil daripada nilai kritis ( $\alpha = 5\% = 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* adalah model yang lebih baik dibandingkan dengan *Common Effect Model*.

**Tabel 4.2 Hasil Uji *Hausman***

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	25.709443	3	0.0000

Uji *Hausman* dapat dilihat bahwa nilai probabilitasnya sebesar 0.0000. Uji *Hausman* mengatakan apabila nilai probabilitas lebih kecil dibandingkan dengan nilai kritis atau alfa ( $\alpha = 5\% = 0.05$ ), maka hasil menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* lebih baik dibandingkan dengan *Random Effect Model*. Dari tabel Uji *Hausman* menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0000 maka nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai kritis 0.05. Jadi hasil dari pengujian Uji *Hausman* menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* lebih baik dibandingkan dengan *Random Effect Model*.

**Tabel 4.3 Hasil Uji *Fixed Effect Model***

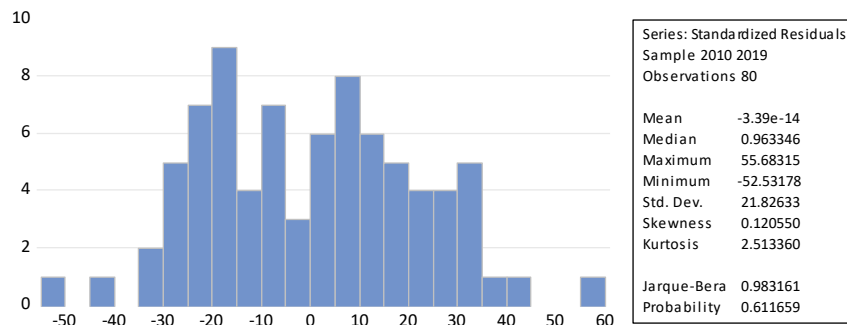
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2092.307	36.92114	56.66964	0.0000
X1	-4.70E-07	1.13E-07	-4.170355	0.0001
X2	-2.35E-07	9.55E-08	-2.459176	0.0164
X3	5.60E-06	2.41E-06	2.329626	0.0228
R-squared	0.999932	Mean dependent var		2837.594
Adjusted R-squared	0.999923	S.D. dependent var		3479.991
S.E. of regression	23.35446	Sum squared resid		37634.72
F-statistic	102159.6	Durbin-Watson stat		0.619125
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berikut merupakan hasil interpretasi regresi dan analisis penggunaan APBDes Subsidi Infrastruktur, APBDes Subsidi Kemiskinan, dan APBDes Ekonomi BUMDes terhadap Kemiskinan di Kabupaten Jombang.

1.  $\alpha$  merupakan nilai konstanta sebesar 2092.307 merupakan besarnya nilai penggunaan APBDes Subsidi Infrastruktur, APBDes Subsidi Kemiskinan dan APBDes Ekonomi BUMDes yang bernilai konstan. Dengan kata lain, apabila rasio penggunaan APBDes Subsidi Infrastruktur, APBDes Subsidi Kemiskinan, dan APBDes Ekonomi BUMDes sebesar 0 maka kemiskinan sebesar 2092.307.
2.  $\beta_1$  merupakan koefisien dari variabel APBDes Anggaran Infrastruktur yang sebesar -4.70E-07, mengartikan apabila APBDes Anggaran Infrastruktur mengalami kenaikan satu persen, maka kemiskinan akan mengalami penurunan 4.70E-07 persen. Jadi jika disimpulkan variabel APBDes anggaran infrastruktur memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan dimana jika kemiskinan turun maka APBDes Anggaran Infrastruktur naik dan berpengaruh secara signifikan.
3.  $\beta_2$  merupakan koefisien dari APBDes Subsidi Kemiskinan yang bernilai sebesar -2.35E-07, hal ini berarti bahwa apabila APBDes Subsidi Kemiskinan mengalami kenaikan satu persen, maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 2.35E-07 persen. Hasil estimasi model *Fixed Effect Model* (FEM) didapat nilai dari probabilitas variabel APBDes Subsidi Kemiskinan sebesar 0.0164 dimana angka ini lebih kecil dari nilai kritis atau  $\alpha = 5\%$  (0.05).
4. Angka tersebut dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu persen dari variabel APBDes Subsidi Kemiskinan, maka kemiskinan akan terjadi kenaikan sebesar 5.60E-06 persen. Hasil estimasi model *Fixed Effect Model* memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0228, di mana angka ini memiliki nilai lebih kecil dibandingkan dengan nilai kritis  $\alpha = 5\%$  (0.05). Bumdes memiliki hubungan positif dengan kemiskinan di mana jika APBDes Ekonomi BUMDes naik maka akan terjadi kenaikan kemiskinan dan berpengaruh secara signifikan.

## 4.2 Uji Asumsi Klasik

### 4.2.1 Uji Normalitas



**Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas**

Berdasarkan Gambar 4.1, nilai probabilitas *Jarque Berra* sebesar 0.983161 dengan perbandingan nilai probabilitas alpha 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas *Jarque berra* > dari nilai probabilitas alpha. Sehingga  $H_0$  dapat diterima atau data terdistribusi normal. Jika dilihat dari nilai *Jarque Berra* dari Gambar 4.1 sebesar 0,611659 lebih besar dibandingkan dengan nilai alpha 0.05.

### 4.2.2 Uji Multikolinieritas

**Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas**

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.155390	0.292294
X2	0.155390	1.000000	0.494571
X3	0.292294	0.494571	1.000000

Dapat dilihat bahwa hasil dari uji multikolonieritas antar variabel independen memiliki koefisien yang nilainya kurang dari 0.8, maka hasil uji multikolonieritas tidak terjadi masalah multikolonieritas pada model regresi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yang ada pada model tidak memiliki nilai koefisien korelasi < 0.8 maka permasalahan multikolonieritas tidak terjadi pada model regresi penelitian ini.

### 4.2.3 Uji Heterokedastisitas

**Tabel 4.5 Hasil Uji Heterokedastisitas**

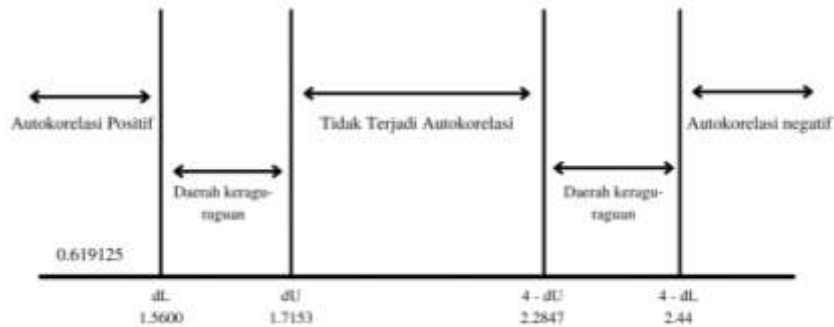
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	55.86840	21.50076	2.598438	0.0114
X1	-9.51E-08	6.03E-08	-1.577949	0.1192
X2	-1.52E-08	7.40E-08	-0.205744	0.8376
X3	3.87E-06	2.13E-06	1.812911	0.0742

Hasil dari uji heterokedastisitas pada setiap variabel independent memiliki nilai probabilitas diatas 0.05. Nilai dari masing - masing variabel X1, X2, dan X3 adalah 0.1192, 0.8376, dan 0.0742, dari nilai tersebut berarti bahwa lebih besar dari nilai alpha 0.05. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada data regresi penelitian ini data tidak terjadi masalah heterokedastisitas, karena nilai probabilitas pada setiap variabel independen



lebih besar dibandingkan dengan nilai alpha 0.05, sehingga tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

#### 4.2.4 Uji Autokorelasi



Gambar 4.2 Hasil Uji Autokorelasi

Dari Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa pada penelitian ini terjadi autokorelasi positif. Gujarati dan Porter (2012), berpendapat bahwa jika uji asumsi klasik dalam analisis data panel dapat meminimalisasikan bias yang kemungkinan besar muncul dalam hasil analisis, memberikan banyak informasi dan variasi, serta *degree of freedom*. Sehingga keunggulan data panel tidak dapat mendeteksi serta mengukur dampak dengan lebih baik dimana hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan metode *cross section* atau *time series*.

### 4.3 Uji Hipotesis

#### 4.3.1 Uji F

Tabel 4.6 Hasil Uji F

R-squared	0.999932	Mean dependent var	2837.594
Adjusted R-squared	0.999923	S.D. dependent var	3479.991
S.E. of regression	23.35446	Sum squared resid	37634.72
F-statistic	102159.6	Durbin-Watson stat	0.619125
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan Tabel 4.6 didapatkan  $df_1$  pada penelitian kali ini pada angka 7 dan  $df_2$  sebesar 69, sehingga  $f$  tabel pada penelitian kali ini sebesar 2.15. Pada tabel (4.6) diketahui bahwa hasil dari uji *Fixed Effect Model* memiliki estimasi dari  $f$ -statistik atau  $f$  hitung sebesar 102159.6. Sedangkan nilai dari probabilitas  $f$ -statistik sebesar 0.0000. Dapat dianalisis dalam uji F ini bahwa nilai dari  $f$ -statistik 102159.6 > daripada nilai  $f$  tabel sebesar 2.15. Sedangkan nilai probabilitas  $f$ -statistik 0.0000 < dibandingkan dengan nilai alpha 5% (0.05). Dapat diartikan dalam penelitian ini bahwa pada Uji F semua variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau kemiskinan.

### 4.3.2 Uji t

**Tabel 4.7 Hasil Uji t**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2092.307	36.92114	56.66964	0.0000
X1	-4.70E-07	1.13E-07	-4.170355	0.0001
X2	-2.35E-07	9.55E-08	-2.459176	0.0164
X3	5.60E-06	2.41E-06	2.329626	0.0228

Didapat bahwa t tabel sebesar 1.66515 dengan nilai df sebesar 76. Dalam Tabel 4.7 diketahui bahwa nilai t-statistik dari setiap variabel independen dan nilai probabilitas t-statistik setiap variabel independen. Nilai t-statistik dari variabel APBDes anggaran Infrastruktur sebesar -4.170355 dan nilai dari probabilitas t-statistik sebesar 0.0001. Sedangkan hasil Uji t dilihat dari hasil uji *Fixed Effect Model* variabel APBDes Subsidi Kemiskinan nilai t-statistik sebesar -2.459176 dan dengan nilai probabilitas t-statistik sebesar 0.0164. Hasil Uji t dari variabel APBDes Ekonomi BUMDes nilai dari t-statistik sebesar 2.329626 dan nilai probabilitas t-statistik sebesar 0.0228. Maka dapat ditarik kesimpulan hipotesis bahwa variabel APBDes anggaran Infrastruktur  $H_a$  diterima, variabel APBDes Subsidi Kemiskinan  $H_a$  diterima, dan variabel APBDes Ekonomi Bumdes  $H_a$  diterima.

### 4.3.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 4.8 Hasil Uji  $R^2$**

R-squared	0.999932	Mean dependent var	2837.594
Adjusted R-squared	0.999923	S.D. dependent var	3479.991
S.E. of regression	23.35446	Sum squared resid	37634.72
F-statistic	102159.6	Durbin-Watson stat	0.619125
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan tabel (4.8), dapat dilihat bahwa nilai *R-Square* sebesar 0.999932. Nilai ini berarti jika pengaruh variabel APBDes anggaran Infrastruktur, APBDes Subsidi Kemiskinan, dan APBDes Ekonomi BUMDes terhadap kemiskinan adalah sebesar 99.99% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar model.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Pada penelitian ini terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. APBDes anggaran infrastruktur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang. Hal ini disebabkan karena dengan adanya infrastruktur publik yang memadai maka akan banyak mobilitas yang terjadi dan membuat banyaknya para investor masuk kedalam wilayah tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan angka kemiskinan dapat berkurang.
2. APBDes subsidi kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Jombang. Hal ini disebabkan karena adanya subsidi untuk masyarakat miskin membuat beban berkurang serta dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar maka akan

dapat meningkatkan kualitas hidup sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada.

3. APBDes Ekonomi BUMDes memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan di Kabupaten Jombang. Hal ini dikarenakan bahwa BUMDes tidak berkontribusi secara langsung kepada masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Jombang. BUMDes hanya mampu meningkatkan pendapatan para pengelola dan anggota BUMDes tetapi belum bisa berkontribusi secara langsung kepada masyarakat miskin. Sehingga APBDes Ekonomi BUMDes belum mampu mengurangi angka kemiskinan.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur publik yang masih belum merata antar daerah maka diharapkan ada peningkatan investasi yang masuk untuk dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur yang ada sehingga angka kemiskinan dapat berkurang. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu menfokuskan pada pembangunan infrastruktur publik yang dapat untuk mengurangi kemiskinan seperti telekomunikasi dan transportasi.
2. Pemerintah dalam pemberian bantuan atau subsidi kepada masyarakat miskin harusnya melihat kondisi keluarga apakah layak diberikan bantuan atau tidak, agar tidak terjadi banyaknya kasus salah sasaran pemberian bantuan. Dengan bantuan dapat tersalurkan dengan tepat sasaran maka akan dapat membantu untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada.
3. Berkaitan dengan BUMDes yang dalam pengoperasiannya belum optimal dalam mengatasi kemiskinan, maka pemerintah dapat mengkaji ulang dalam penentuan sasaran anggota dari BUMDes. Selain itu pemerintah juga dapat memberikan pelatihan melalui BUMDes kepada masyarakat desa agar memiliki keahlian dan memberikan bantuan modal kepada masyarakat agar dapat membuat sebuah usaha setelah memiliki keahlian, sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat dan angka kemiskinan dapat berkurang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 1992. *Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: STIE YKPN. Edisi 2. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Boediono. 2012. *Ekonomi Internasional*. In . Yogyakarta: Buku Bhakti Profesindo (BPFE).
- Friedman, J. 1979. *Urban Poverty in America Latin. Some Theoretical Consideration, dalam Dorodjatun Kuntjoro Jakti (ed)*.
- Kadji, Y. 2012. *Kemiskinan dan Konsep teoritisnya. Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonmi Dan Bisnis UNG: 1–7*.
- Kuncoro, M. 1997. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan Cetakan pertama. Yogyakarta: Unit penerbitan dan percetakan akademi manajemen perusahaan YKPN*.
- Lipsey, R. G., P. N. Courant, D. D. Purvis, dan P. O. Steiner. 1997. *Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.

- Malthus, T. R. 1836. *Principles of political economy considered with a view to their practical application*. William Pickering.
- Marx, K. 2004. *Kapital: Sebuah Kritik Ekonomi Politik*. Volume 1. Jakarta: Hasta Mitra.
- PP RI. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Indonesia.
- Rizal, A. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Jember Tahun 1998-2012.
- Samuelson, P. A., dan W. D. Nordhaus. 1993. *Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Siregar, H., dan D. Wahyuniarti. 2007. Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. *Economics Development*: 1–28.
- Sukasmanto et al. 2004. *Promosi Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Sukirno, S. 2000. Makroekonomi modern. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.
- . 2003. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumpeno, W. 2011. Perencanaan desa terpadu. *Banda Aceh: Read*.
- Tambunan, T. 2012. *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia*. LP3ES. Jakarta.
- Todaro, M. P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- World Bank. 2000. Global Poverty Report.